

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adam, Muhammad, 2006, *Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial*, Sinar Baru, Bandung
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Alumni, Bandung
- _____, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung
- Afandi, Alfi, 2004, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Algra, N.E., H.R.W. Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeki dan Boerhanoeddin St. Batoeah, 2006, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung
- Andasasmita, Komar, 2010, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press, Yogyakarta
- Fajar ND, Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditnya Bakti, Bandung
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar maju
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung
- _____, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Normatif, Prinsip-Prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Penerjemah Nurulita Yusron, Nusamedia, Bandung
- Khorn, Robert D., 1992, *The Significance of The Professional Ideal*, The Annals, Philadelphia
- Kie, Tan Thong, 2007, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, Alumni, Bandung

- Koesoemawati, Ira, 2009, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1988, *Hak Ingkar dari Notaris dan hubungannya dengan KUHAP*, Media Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya
- Kohar, A., 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- _____, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- _____, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Ketiga, Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Etika Profesi Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta
- Notodisoerjo, Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Pitlo, 2006, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Internusa, Jakarta
- Prodjodikoro, Wiryono, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- _____, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum*, Grafika, Jakarta
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerodjo, Irawan, 2012, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya
- Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor

Subekti, R, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, Intermasa, Jakarta

_____, 2006, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta

Sumaryono, E, 1995, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta

Supomo, 2006, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta

Suseno, Franz Magnis, 1998, *Etika Sosial*, Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK, Jakarta

Sutarno, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung

Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penengakan Hukum Pidana*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta

Tobing, GHS Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Kode Etik Notaris , ditetapkan dibanding pada tanggal 27 Januari 2005

Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 29-30 Mei 2015 di Banten.

Makalah/Jurnal/Media Massa

Adjie, Habib, 2015, *Memahami Kembali Pemanggilan Notaris, Pengambilan, Penyitaan Minuta akta Notaris Oleh Penyidik Dan Perlindungan Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*. Makalah pada Seminar Nasional: Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Lampu Merah Oleh Majelis Kehormatan Notaris di Magister Kenotariatan FH Universitas Diponegoro 6 Juni 2015. Semarang

Arisaputra, Muhammad Ilham, “Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris,” Jurnal Perspektif, Vol. XVII No. 3 Tahun 2012, Edisi September 2012

Hadjon, Philipus M., “Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik”, Surabaya Post, 31 Januari 2011

Harian Bernas, September 2011

- Nurung, M., 2006, *Notaris Tidak Tepat Dijadikan Saksi Hukum Perdata*, Majalah Renvoi 12 Edisi Mei
- Riyanto, Sigid, 2015, *Tindak Pidana Tertentu Yang Terkait Dengan Notaris dan PPAT*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Sofyan, Syafran, 2015, *Perlindungan Hukum Profesi PPAT-Notaris*, Makalah pada Seminar Nasional: Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Lampu Merah Oleh Majelis Kehormatan Notaris di Magister Kenotariatan FH Universitas Diponegoro 6 Juni 2015, Semarang
- Subrata, Purwoto Ganda, 2005, *Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum Di Dalam Mengisi dan Turut Mensukseskan Pembangunan Nasional di Bidang Hukum*, Renungan Hukum
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1992, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHAP*, Media Notariat, Edisi Januari-Oktober 1992
- Utami, Sri, 2015, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, Edisi 3, Januari-Juni 2015
- Widjojanto, Bambang, 2005, “*Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah Pokok*”.Ceramah: Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I, Depok, April-Juni 2005

Internet

- Anonim, “Persetujuan MKN Adalah Kunci Pembuka Kewajiban Ingkar Notaris”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54511017e573c/persetujuan-mkn-adalah-kunci-pembuka-kewajiban-ingkar-Notaris>, diunduh pada 15 Juli 2016